

**PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh**



**Dibawah Bimbingan**

- 1. SUHARIZAL, S.H, M.H.**
- 2. FRENADIN ADE GUSTARA, S.H, M.S.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2019**

## PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Gustina Rahayu Az, NIM : 1520123088, Program Magister Kenotariatan, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 105)

### Abstrak

Panitia urusan piutang Negara (PUPN) yang berada di pusat ibukota Negara merupakan suatu panitia untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan wewenang dan tugas, maka dibentuk suatu lembaga yang bernama Badan Urusan Piutang Negara yang berganti nama menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang saat ini telah berganti Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang kemudian Direktorat Jenderal Jenderal Kekayaan Negara, Badan ini berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan untuk operasional di daerah-daerah kota dan daerah Kabupaten dibentuk Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (untuk selanjutnya disebut KPKNL yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (untuk selanjutnya disebut KPKNL). Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara merupakan lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara yang merupakan jaminan hutang di bank-bank pemerintah. Dalam hal pengaturan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah kepada Debitur jika dihadapkan pada permasalahan Debitur tidak dapat melunasi pembayaran kreditnya berdasarkan perjanjian kredit yang telah di sepakati, bank telah menempuh upaya-upaya agar Debitur dapat melunasi pembayaran kreditnya, maka dalam hal kredit bermasalah dan macet tersebut sebagai piutang negara yang tidak tertagih. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Bahwa sejak di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-undang Nomor 49 Bp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghasilkan putusan bahwa Piutang Bank Badan Usaha Milik Negara bukan merupakan Piutang Negara lagi sehingga penyelesaian Piutang tidak lagi dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara tetapi penyelesaian Piutangnya dapat diselesaikan melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan perbankan yang sehat. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam Hukum Keuangan Negara yang berkaitan langsung dengan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara mengenai pelimpahan wewenang yang semula di lakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara di bawah Menteri Keuangan kemudian dilakukan melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing karena hal ini berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban keuangan Negara.

*Kata kunci : Lelang Panitia Urusan Piutang Negara, Penyelesaian Piutang.*

IMPLEMENTATION OF EXECUTION AUCTION OF COUNTRY RECEIVABLES  
PARTICIPANTS VIEWED FROM THE ASPECT OF STATE ADMINISTRATION  
LAW

(Gustina Rahayu Az, NIM : 1520123088, Notary Masters Program, Faculty of Law  
Andalas University, Number of Pages: 105)

Abstract

The Committee for State Debt Affairs (PUPN), which is in the center of the capital city of the State, is a committee to streamline the implementation of authority and duties. An institution called the State Receivables Affairs Agency was renamed the State Debt and Auction Agency which has now changed the Directorate General State Accounts Receivable and Auction which is then the Directorate General of State Assets, this Agency is directly under and is responsible to the Minister of Finance for operations in the city and regency areas. The Office of State Receivables and Auction Management is formed (hereinafter referred to as KPKNL) the name is the State Wealth and Auction Office (hereinafter referred to as KPKNL). Confiscated Auction of the State Receivables Affairs Committee is an auction carried out on confiscated goods of the State Receivables Affairs Committee which is a debt guarantee at state banks. if given by a government bank to a debtor when faced with a problem the debtor cannot repay his credit payment based on a agreed credit agreement, the bank has taken measures so that the debtor can pay off his credit payments, so in the case of non-performing loans as state accounts uncollectible. This research is a sociological juridical, namely the approach taken to applicable legal norms is related to the facts in the field. That since the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 77 / PUU-IX / 2011 concerning the testing of Law Number 49 Pp Year 1960 concerning the Committee on State Receivables with the State Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 resulted in the decision that the Bank's State Owned Enterprise Receivables are not Other State Receivables so that the settlement of Receivables is no longer delegated to the Committee of State Receivables Affairs but the settlement of the Receivables can be settled through the mechanism of each banking company using the principles of a sound banking company. Based on the results of this study, suggestions are suggested. Further study in the State Financial Law relating directly to the State Debt Affairs Committee Execution concerning the delegation of authority previously carried out by the State Debt Affairs Committee under the Minister of Finance was then carried out through the mechanism of each banking company. because this is directly related to the accountability of State finances

*Keywords : Auction of the State Debt Affairs Committee, Receivable Settlement.*

